

LAPORAN

PEMANTAUAN PEMUNGUTAN SUARA PENDAHULUAN PEMILU SERENTAK 2019 DI LUAR NEGERI (Malaysia, Singapura dan Hong Kong)

Disusun oleh:

Migrant CARE

Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	3
B. PEMANTAUAN	4
B.1. Metode Pemantauan	4
B.2. Rencana Pemantauan	4
B.3. Fokus Tahapan	5
B.4. Jumlah Anggota Pemantauan	5
C. HASIL PEMANTAUAN	5
C.1. Hasil Pemantauan di Malaysia	6
C.1.1. Pemantauan di Kuala Lumpur	6
C.1.2. Pemantauan di Johor Bahru	7
C.1.3. Potensi Pelanggaran Pemilu di Malaysia	9
C.1.4. Rekomendasi Penyelenggaraan Pemilu di Malaysia	10
C.2. Hasil Pemantauan di Hong Kong	10
C.2.1. Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu di Hong Kong	10
C.2.2. Proses Pemungutan Suara di Hong Kong	13
C.2.3. Potensi Pelanggaran Pemilu di Hong Kong	13
C.2.4. Rekomendasi Penyelenggaraan Pemilu di Hong Kong	14
C.3. Hasil Pemantauan di Singapura	15
C.3.1. Proses Pemungutan Suara di Singapura	15
C.3.2. Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu di Singapura	17
C.3.3. Proses Penghitungan Suara di Singapura	18
C.3.4. Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu di Singapura	18
C.3.5. Potensi Pelanggaran Pemilu di Singapura	19
C.3.6. Rekomendasi Penyelenggaraan Pemilu di Singapura	20
D. PENUTUP DAN KESIMPULAN	21
E. LAMPIRAN	22
F.1. Dokumentasi Pemantauan Pemilu di Malaysia	22
F.2. Dokumentasi Pemantauan Pemilu di Hong Kong	23
F.3. Dokumentasi Pemantauan Pemilu di Singapura	24

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum 2019 menjadi penyelenggaraan Pemilu pertama kali yang dilaksanakan serentak untuk memilih Presiden-Wakil Presiden dan Anggota Legislatif dalam waktu yang bersamaan. Situasi ini berimplikasi dengan bertambahnya tingkat kerumitan pemungutan suara maupun teknis dan pengelolaan dalam penyelenggaraan Pemilu dari berbagai aspek. Selain di dalam negeri, Pemilu Republik Indonesia 2019 juga diselenggarakan di 130 negara. Berbeda dengan Pemilu di dalam negeri yang menggunakan (hingga) lima surat suara untuk satu orang pemilih, pemilih di luar negeri hanya mendapatkan dua surat suara, yaitu untuk memilih Presiden-Wakil Presiden dan Anggota DPR-RI Dapil DKI Jakarta II.

Dari sisi kuantitas, meskipun tidak secara signifikan, pemilih luar negeri dalam Pemilu 2019 mengalami peningkatan dibanding dengan Pemilu periode sebelumnya. Terdapat 2.058.191 orang yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019, jumlah ini kemudian dikoreksi dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional menjadi 2.086.285 orang. Namun demikian, jumlah ini masih sangat rendah dan terindikasi belum mencakup keseluruhan WNI di luar negeri yang mayoritasnya adalah pekerja migran perempuan dengan jumlah sekitar 6,5 juta orang. Persebaran pemilih di luar negeri berpusat pada titik-titik arus migrasi pekerja migran dan pelajar Indonesia di antaranya Malaysia, Hong Kong dan Singapura. Malaysia menjadi basis jumlah terbesar pemilih pada Pemilu 2019 di luar negeri. Jumlahnya mencapai 56 persen dari jumlah keseluruhan pemilih di luar negeri.

Di sisi lain, terdapat perbedaan metode pemungutan suara yang diterapkan pada penyelenggaraan Pemilu 2019 di luar negeri dibanding dengan metode pemungutan suara di dalam negeri. Secara umum, terdapat tiga metode yang diterapkan meliputi; Tempat Pemungutan Suara (TPS), Kotak Suara Keliling (KSK) dan Surat Pos. Pemilu di luar negeri juga diselenggarakan lebih awal dibandingkan pelaksanaan Pemilu di dalam negeri. Dengan ragam metode pemungutan suara tersebut, seharusnya mutlak diperlukan mekanisme pengawasan yang konkrit dan komprehensif agar penyelenggaraan Pemilu tidak melanggar etik dan prinsip demokrasi.

Malaysia sebagai basis pemilih di luar negeri menerapkan tiga mekanisme pemungutan suara (TPS, KSK dan Surat Pos). Sementara di Hong Kong, Singapura dan beberapa negara lain hanya menerapkan dua metode pemungutan suara meliputi TPS dan Surat Pos. Hal ini dilakukan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

Secara teknis penyelenggaraan, Singapura dan Hong Kong juga menjadi dua dari beberapa negara yang menerapkan sistem *barcode* sebagai sistem pengorganisasian pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini menarik, karena sistem *barcode* dianggap dapat membuat penyelenggaraan Pemilu menjadi lebih efektif dengan jumlah pemilih yang cukup banyak. Meninjau penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, kita tidak bisa melupakan kekisruhan yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu 2014 di Hong Kong yang menyebabkan ratusan pemilih kehilangan hak pilihnya karena waktu pemungutan suara yang dibatasi tanpa mempertimbangkan jumlah antrian pemilih.

Partisipasi politik Warga Negara Indonesia dalam Pemilu di luar negeri juga layak menjadi sorotan. Dari dua periode penyelenggaraan Pemilu (2009 dan 2014), partisipasi pemilih di luar negeri masih cenderung rendah. Angkanya masih berkisar 30 persen,

ketimpangan partisipasi politik juga terjadi antara Pemilu Presiden-Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif yang dahulu diselenggarakan dalam waktu yang berbeda.

Kompleksitas serta kerumitan yang dihadapi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri masih memiliki potensi untuk membuka ruang penyalahgunaan tata kelola Pemilu maupun hilangnya hak politik pemilih yang sedianya harus difasilitasi sepenuhnya oleh penyelenggara Pemilu. Atas berbagai situasi dan dinamika yang terjadi, menjadi alasan yang penting akan urgensi pemantauan atas penyelenggaraan Pemilu di luar negeri untuk memastikan agar penyelenggaraan yang tetap berprinsip langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Migrant CARE sebagai lembaga yang terakreditasi sebagai Pemantau Pemilu Independen oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, menjalankan wewenangnya untuk melakukan pemantauan Pemilu di luar negeri mencakupi tiga wilayah meliputi; Malaysia, Hong Kong dan Singapura.

B. PEMANTAUAN

B.1. Metode Pemantauan

Migrant CARE melakukan pemantauan Pemilu Serentak 2019 di empat titik wilayah, di tiga negara meliputi; Malaysia (Kuala Lumpur dan Johor Bahru), Singapura dan Hong Kong. Dengan tetap mengacu pada Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum, pemantauan Pemilu Migrant CARE di masing-masing wilayah dilakukan menggunakan pendekatan observatif untuk meninjau proses pada tahapan pemungutan suara pendahuluan dan penghitungan suara yang akan dilakukan setelah pemungutan suara di dalam negeri selesai.

Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung di lokasi penyelenggaraan Pemilu di Singapura, serta penggalian informasi melalui wawancara singkat kepada pihak-pihak penyelenggara Pemilu maupun pemilih di lokasi pemantauan. Proses pemantauan juga dilakukan menggunakan pengelolaan informasi sekunder yang didapatkan secara daring maupun luring.

B.2. Rencana Pemantauan

Tabel B.2. Rencana Pemantauan

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Lokasi
1	12 -13 April 2019	Persiapan dan Perjalanan dari Jakarta	-
2	14 April 2019	Pemantauan Proses Pemungutan Suara	Malaysia, Hong Kong dan Singapura
3	15-16 April 2019	Masa tenang, Pemantauan Lokasi Pemungutan dan Penyimpanan Suara	Malaysia, Hong Kong dan Singapura
4	17-18 April 2019	Pemantauan Proses Penghitungan Suara	Malaysia, Hong Kong dan Singapura

B.3. Fokus Tahapan

Secara umum, fokus pemantuan Pemilu yang ditetapkan adalah pada tahapan pemungutan suara melalui Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPS LN) dan penghitungan suara. Namun melalui kerangka observasi yang dilakukan, pemantuan juga mengukur tahapan persiapan, hingga pasca penyelenggaraan.

B.4. Jumlah Anggota Pemantuan

Terdapat sebelas orang pemantau dari Migrant CARE yang dimandatkan untuk melakukan pemantuan di wilayah Hong Kong, Malaysia dan Singapura;

Tabel B.4. Anggota Pemantuan Migrant CARE

No	Nama	L/P	Jabatan di Migrant CARE	Wilayah Pemantuan
1	Wahyu Susilo	L	Direktur Eksekutif	Hong Kong
2	Zulyani Evi	P	Data and Publication Officer	Hong Kong
3	Qorihani	P	Relawan Pemantau	Hong Kong
4	Niken Anjar W	P	Relawan Pemantau	Hong Kong
5	Anwar Maarif	L	Relawan Pemantau	Hong Kong
6	Anis Hidayah	P	Ketua Pusat Studi dan Kajian Migrasi	Kuala Lumpur
7	Siti Badriyah	P	Koordinator Advokasi Kebijakan	Kuala Lumpur
8	Safina Maulida	P	Project Officer SDGs	Kuala Lumpur
9	Romlah	P	Relawan Pemantau	Kuala Lumpur
10	Ika Masrurroh	P	Staf Bantuan Hukum	Johor Bahru
11	Fitri Lestari	P	Staf Bantuan Hukum	Johor Bahru
12	Syaipul Anas	L	Koordinator Program Migrant CARE Kebumen	Singapura
13	Yovi Arista	L	Data and Publication Officer	Singapura

C. HASIL PEMANTAUAN

Untuk memudahkan pemahaman substansi laporan, berikut adalah hasil pemantuan yang terpetakan berdasarkan wilayah penyelenggaraan dan tahapan Pemilu di Malaysia, Hong Kong dan Singapura:

C.1. Hasil Pemantuan di Malaysia

Malaysia menjadi basis pemilih luar negeri Pemilu Indonesia 2019 dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 1.104.556 orang atau 56 persen dari total DPT di luar negeri. Pemilih di Malaysia sedianya akan menggunakan hak pilihnya dalam tiga metode pemungutan suara (TPS, KSK dan Surat Pos) yang tersebar di 6 negara bagian meliputi: Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kota Kinabalu, Kuching, Penang dan Tawau.

Tabel C.1. Jumlah Pemilih di Malaysia

No	Wilayah	Jumlah Pemilih TPS	Jumlah Pemilih KSK	Jumlah Pemilih Pos
1	Kuala Lumpur	127,044	112,536	319,293

2	Johor Bahru	5,906	126,063	1,284
3	Kota Kinabalu	11,287	129,591	0
4	Kuching	1,191	137,424	337
5	Penang	2,432	30,447	27,731
6	Tawau	20,068	51,922	0
Jumlah Total		167,928	587,983	348,645
		1,104,556		

Migrant CARE melakukan pemantauan pada dua wilayah di Malaysia meliputi Kuala Lumpur dan Johor Bahru.

C.1.1. Pemantauan di Kuala Lumpur

C.1.1.1. Pemungutan Suara Melalui Kotak Suara Keliling

Pemantauan Pemilu di Kuala Lumpur diawali pada Jumat, 12 April 2019 untuk memantau pemungutan suara melalui KSK sekaligus arus mobilisasi KSK. Hingga pukul 00.00 waktu setempat, KSK masih berdatangan dari berbagai titik ke KBRI Kuala Lumpur. Tak jarang KSK berasal dari daerah yang jaraknya 7 jam dari KBRI, seperti Trengganu dan Kelantan. Menurut penuturan Bu Nafiah, KPPSLN KSK Trengganu 1578, yang membutuhkan 14 jam untuk pulang-pergi membawa KSK. Bu Nafiah dan timnya yang berjumlah 2 orang berangkat pada 12 April, jam 11 siang, tiba di Trengganu pukul 5 sore. Di sana dimulai proses pemungutan suara dari jam 7 sampai 12 malam, dan hanya mengakomodir sebanyak 62 pemilih.

Bisa dibayangkan, perbandingan antara tingkat perjuangannya dengan jumlah pemilihnya. Beliau dan timnya juga harus menginap satu malam di mobil dan itupun tidak tidur karena takut. Dalam mobilisasi KSK tersebut tidak ada saksi dan Panwas. KSK itu menyediakan pemilihan untuk pekerja ladang/perkebunan kelapa sawit. Saat menjumpai Bu Nafiah di KBRI yang baru datang dari Trengganu, nampak dari wajahnya yang tidak sempat tidur, tidak mandi, tidak berganti pakaian dan pucat. Bu Nafiah adalah seorang buruh migran yg bekerja sebagai cleaner berasal dari Madura dimana tahun ini mendaftar sebagai KPPSLN. Banyak buruh migran yang menjadi anggota KPPSLN.

Lain lagi cerita di KSK 122 yang berlokasi di Gumut Tambahan Kuala Kubu Baru Selangor, jarak tempuh 2 jam dari Kuala Lumpur. Kami memantau langsung perjalanannya dengan ikut mobil yang membawa KSK dengan 3 orang petugas KPPSLN dimana salah satunya adalah buruh migran. Situasi Gumut jauh dari hingar bingar kota, karena berlokasi di kawasan perkebunan. Kami berangkat dari KL jam 11 dan tiba di lokasi jam 1. Untuk masuk ke lokasinya perlu melewati jalan makadam berkilo-kilo. KSK bertempat di emperan warung milik buruh migran. Emperan/teras samping warung disulap jadi tempat bilik suara dan pendaftaran pemilih berlokasi di gubug kecil berukuran 2x2 meter di depan warung yang beratap seng yang dilengkapi dengan meja dan 4 kursi plastik.

KSK dibuka pukul 13.30 dengan dihadiri Saksi Paslon Capres 01 dan 02, minus Panwaslu. Para pemilih mayoritas pekerja perkebunan sayur, peternak ayam dan kilang.

Dari jam 13.30- 17.00 pemilih yang datang tidak banyak, 2-3 orang datang bergantian dengan motor, rata-rata mereka datang setelah dapat ijin 1-2 jam dari majikan, setelah mencoblos, kembali bekerja. Sore hari setelah pukul 17.00 baru berdatangan rombongan buruh migran yang bekerja di kilang agak banyak, 50-an orang. KSK ditutup jam 19.00 dengan total pemilih 212 orang, dimana 52 pemilih dr DPT dan 160 dari DPK (Daftar Pemilih Khusus) yang tidak terdaftar.

Kami tiba jam 22.00 di KBRI, malam itu 130-an KSK datang dari berbagai titik dengan total pemilih sekitar 27 ribuan, hanya 30 persen dari DPT KSK yang berjumlah 112.536. Pelaksanaan KSK sesungguhnya bentuk jihad demokrasi jika melihat perjuangannya menjumpai pemilih, namun di sisi lain juga rentan pelanggaran karena minim pengawasan, mayoritas KSK di Kuala Lumpur diselenggarakan tanpa pengawas.

C.1.1.2. Pemungutan Suara melalui TPSLN

Pemungutan suara serentak di Malaysia melalui TPS diselenggarakan Minggu, 14 April 2019. Di Kuala Lumpur seharusnya terdapat 14 titik lokasi untuk 200 TPS dengan total pemilih dalam DPT 127.044 pemilih. Informasi mendadak terkait perubahan skenario pemungutan suara didapat pada Sabtu, 13 April 2019, pukul 23.00 waktu Malaysia. Perubahan terkait persebaran TPS yang menjadi di 3 titik: KBRI, SIKL, dan Wisma Duta. Bisa dibayangkan pemilih pasti membludak, dari 14 titik mengerucut ke 3 titik. Di KBRI direncanakan ada 27 TPS yang kemudian diubah menjadi 78 TPS, dan pada malam hari bertambah lagi 3 TPS. Jam 08.00 pagi, antrean sudah memanjang di pinggir trotoar halaman KBRI. Di area dalam juga tidak ada tenda ataupun peneduh di padatnya pemilih. Antrian panjang diperparah dengan hanya disediakannya 5 meja untuk pendaftaran.

Jam 09.00, teriakan mulai terdengar dari antrean pemilih di luar pintu gerbang KBRI: mereka meneriakkan "*panas, buka pintu, saya mau milih, saya cinta indonesia*" dan mereka saling bersahutan meneriakkan yel-yel dukungan untuk Jokowi atau Prabowo. Jam 10.00, antrian makin berjubel, teriakan makin kencang dan pintu gerbang mulai di tendang-tendang disambut dengan suara gemuruh. Banyak yang pingsan kepanasan, ada seorang ibu hamil yang mengalami pendarahan karena terdorong, anak-anak yang digendong ibunya menangis. Beberapa pemilih menuturkan datang dari jauh dan ijin ke majikan. Mayoritas mereka ketahan, tidak masuk karena tidak terdaftar dan masu DPK. Menurut PPLN, DPK baru bisa memilih setelah pukul 3 sore.

Melihat perkembangan situasi yang makin tidak kondusif, Migrant CARE berupaya menemui Hasyim Asyari, Komisioner KPU dan menyampaikan agar pemilih DPK diberi afirmasi utk bisa memilih tanpa menunggu jam 3. Komisioner KPU ini mengatakan itu bisa dilakukan, tapi harus koordinasi dengan Bawaslu dan ada rekomendasi dari Panwas LN. Kami berdiskusi mempertimbangkan pemilih DPK agar bisa memilih tanpa menunggu jam 3 sore. KPU dan PLLN menggelar rapat utk mengidentifikasi ketersediaan kertas suara. Bawaslu dan Panwas LN juga rapat. Lalu ada rapat antar mereka. Kami sebagai pemantau tentu menunggu diluar ruang rapat. Jam 11.30, rapat mereka setelah dan diputuskan DPK bisa memilih sejak jam 12 dan PPLN mengumumkan di depan KBRI Kuala Lumpur.

Ribuan antrean diluar mulai masuk tanpa dipilah DPT dan DPK, antrian mengular pindah di halaman KBRI. *Online system* pungutan suara sempat down 1 jam sehingga hrs dilakukan manual. Meja pendaftaran dari 5 berubah menjadi 15 meja. Sekitar pukul 19.00 TPSLN KBRI Kuala Lumpur ditutup. Petugas TPS mulai merekap jumlah pemilih. Namun pukul 19.30-an terdengar suara gemuruh di luar pagar KBRI. Ada 200-an buruh migran yang akan milih tapi tidak bisa masuk karena TPS sudah tutup. Mereka katanya kehujanan dan udah mondar mandir dari TPS SIKL ke KBRI 2 kali, mereka sudah 7 jam berjuang. PPLN dan panwas rapat untuk memutuskan bisa nyoblos atau tidak dan keputusannya bisa. Karena TPS sudah tutup, maka dibuatkan 3 TPS baru. Mereka berbaris tertib, mungkin sebagian masuk angin karena kehujanan dan belum makan.

Perubahan skenario pemungutan suara melalui pemusatan titik TPS menyebabkan beberapa kondisi yang berpotensi merugikan pemilih di Kuala Lumpur. Salah satunya yang terjadi di Wisma Duta, yang terpantau minim koordinasi perihal tata kelola pemilih, TPS yang dibuka tidak tepat waktu, hingga minimnya peralatan dan perlengkapan pendukung seperti pengeras suara dan informasi bagi pemilih. Dinamika yang terjadi tanpa adanya langkah mitigasi dan solusi yang responsif ini juga berdampak pada penyelenggaraan Pemilu yang mal-prosedur dan melanggar asas dasar Pemilihan Umum.

C.1.1.3. Pemungutan Suara Melalui Pos

Di Kuala Lumpur, pemilih terbanyak menggunakan pos sejumlah 319.293 orang. Sejak 12 April 2019, PPLN terpantau tidak memiliki rekapitulasi yang jelas tentang berapa surat suara yang dikirimkan via pos dan berapa yang balik karena tidak sampai ke alamat. Terkait dengan pelanggaran pencoblosan surat suara di Selangor, Migrant CARE mendukung penuh keputusan Bawaslu yang merekomendasikan pungutan suara ulang via pos dengan syarat harus ada evaluasi menyeluruh terkait dengan pengelolaan pungutan suara via pos. Di sisi lain, pengetahuan pemilih dalam tata cara pos masih sangat terbatas. Ketidacukupan informasi bagi pemilih menyebabkan penyelenggaraan Pemilu menjadi rawan akan praktik manipulasi dan juga partisipasi pemilih yang minim akibat ketidaktahuan yang terjadi.

C.1.2. Pemantauan di Johor Bahru

C.1.2.1. Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu

Berdasarkan informasi yang didapat dari PPLN Johor Bahru terdapat sekitar 533 Kotak Suara Keliling (KSK) yang disebar di Johor, Negeri Sembilan, Pahang, dan Malaka. Ada 1.284 surat suara yang dikirim lewat pos dan ada sebanyak 12 Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) yang berada di KJRI Johor Bahru.

Penyelenggara Pemilu di Johor Bahru menuturkan telah melakukan sosialisasi satu bulan sebelum Pemilu diselenggarakan. Tim PPLN Johor Bahru melakukan sosialisasi langsung di Johor, Malaka, Pahang dan Negeri Sembilan termasuk di kilang-kilang dan perkebunan. Di sekitar tempat pengurusan dokumen di KJRI JB juga tersebar poster-poster serta baliho mengenai pelaksanaan pungutan suara melalui TPS. Selain secara langsung, sosialisasi juga dilakukan melalui website, facebook dan media online lainnya. Selain sosialisasi, PPLN Johor Bahru juga mengirimkan surat pemberitahuan

PEMILU serentak 2019 ke kilang–kilang dan perkebunan serta meminta daftar pekerja Indonesia yang masih bekerja di sana.

C.1.2.2. Pemungutan Suara di Johor Bahru

a) Pemungutan Suara via Surat Pos

KJRI Johor Bahru mendistribusikan Surat Pos sejumlah 1.284 DPTLN. Pemilih harus mengembalikan surat suara via pos pada tanggal 17 April 2019. Pemungutan suara via pos diduga penuh kerentanan di antara: kepastian WNI masih tinggal atau bekerja di alamat yang ditunjukkan, kepastian surat suara terkirim tepat di alamat tempat WNI tinggal atau bekerja dan kepastian surat suara diterima dan dicoblos oleh pemilih bukan oleh orang lain (majikan dan agensi).

b) Pemungutan Suara via KSK

Ada sebanyak 533 KSK yang tersebar di 4 wilayah Johor Bahru yaitu Johor, Malaka, Pahang dan Negeri Sembilan. Masing-masing KSK terdiri atas 3 petugas KPPSLN dan 1 Panwaslu. Ada kekurangan dalam pemungutan melalui metode ini, kami menemukan adanya koordinasi yang kurang baik antara Petugas KPPSLN dan Panwaslu. Masih ada miskomunikasi dalam penjadwalan dan penentuan titik lokasi KSK sehingga ada beberapa KSK yang tidak diikuti Panwaslu terutama yang lokasinya jauh.

c) Pemungutan Suara via TPSLN

Pemungutan suara TPSLN dilaksanakan pada tanggal 14 april 2019, mulai pukul 08.00 – 18.30 waktu setempat. Terdapat 12 (dua belas) TPSLN dengan masing-masing TPSLN sekitar 500 surat suara. Terpantau terdapat papan informasi contoh surat suara capres dan DPR RI serta daftar DPTLN. Pemungutan suara selesai sekitar pukul 18.30 waktu setempat. Rekap masing-masih TPS selesai sekitar pukul 20.00.

C.1.2.3. Penghitungan Suara di Johor Bahru

Perhitungan suara dilaksanakan pukul 14.00 waktu setempat, dilakukan oleh masing-masing petugas KPPSLN KSK dan TPSLN. Dalam pelaksanaannya, dibagi tiap shift, ada sekitar 144 bilik/partisi yang digunakan untuk menghitung berbarengan. Penghitungan dimulai dari KSK terjauh; Pahang – Negeri Sembilan – Melaka – Johor. Perwakilan saksi partai, panwaslu, dan pemantau diminta untuk menyaksikan rekapitulasi suara KSK dan TPSLN serta diberikan fotokopi dokumen C1-nya. Adanya keterbatasan saksi sehingga 1 orang bisa menjadi saksi di 3 KSK/TPSLN sekaligus. Banyak penghitungan yang hanya disaksikan 1 orang Panwaslu atau 1 orang saksi partai atau 1 orang saksi Capres.

C.1.3. Potensi Pelanggaran Pemilu di Malaysia

Dari pantauan langsung di Malaysia, terdapat beberapa potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Tabel C.1.3. Potensi Pelanggaran Pemilu di Malaysia

No	Bentuk Pelanggaran	Stakeholder Terkait
1	Pendaftaran DPT LN yang tidak partisipatif sehingga jumlah DPT membludak	KPU
2	Kinerja PPLN yang tidak imparial, terutama wakil dubes dan PPLN yang bertanggung jawab pada pos karena pejabat fungsional	PPLN, KPU
3	Tidak adanya pengawasan pada pungutan suara via KSK	Panwaslu, Bawaslu
4	Minimnya pengawasan pada pungutan suara via Pos	Panwaslu, Bawaslu
5	Tidak adanya DPT yang ditempel pada pungutan suara di TPSLN	PPLN, KPU
6	Terbatasnya sosialisasi pemilu oleh PPLN	KPU, PPLN
7	Dugaan tidak imparialnya KPPSLN	KPU, PPLN
8	Dugaan calo suara	Panwaslu, Bawaslu

C.1.4. Rekomendasi Penyelenggaraan Pemilu di Malaysia

1. Integrasi data pekerja migran untuk perbaikan Pendaftaran DPT LN pada Pemilu 2024 dan meningkatkan partisipasi pekerja migran pada penyusunan DPT LN
2. Pemilihan PPLN yang imparial harus dilakukan secara terbuka dan membuka seluas-luasnya kesempatan bagi masyarakat Indonesia, termasuk pekerja migran
3. Penghapusan pungutan suara via KSK
4. Penghapusan pungutan suara via Pos
5. Mendorong penyewaan fasilitas publik yang besar yang bisa mengakomodasi lebih banyak pekerja migran untuk memilih via TPSLN, seperti stadion bukit jalil
6. Memperluas sosialisasi pemilu oleh PPLN
7. Investigasi atas praktik calo suara

C.2. Hasil Pemantauan di Hong Kong

C.2.1. Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu di Hong Kong

Pemilu 2019 telah dimulai dengan penyelenggaraan Pemungutan Suara Pendahuluan (early voting) di Luar Negeri untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta DPR-RI Dapil DKI Jakarta II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri). Di Hong Kong, pemungutan suara pendahuluan telah berlangsung antara 8-14 April 2019 dengan menggunakan dua metode pemungutan suara yaitu Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPS LN) dan Pos. Melibatkan sebanyak 180.232 Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan 112.588 diantaranya akan menggunakan hak pilihnya melalui TPS dan 67.644 lainnya melalui Pos. Sebanyak 99 persen DPT adalah perempuan dengan jumlah 179.193 pemilih.

Berkaca pada Pemilu sebelumnya di tahun 2014, merupakan tonggak bersejarah dimana partisipasi Warga Negara Indonesia (WNI) dalam Pemilu melonjak signifikan berkat kontribusi Pekerja Migran Indonesia. Meskipun partisipasinya meningkat, Pemilu 2014 di Hong Kong belum bisa dikatakan maksimal. Apabila merujuk data jumlah WNI yang dimiliki KJRI Hong Kong, partisipasi Pemilu 2014 dapat dikatakan

kurang dari 20 persen. Menurut mereka, Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi ini diantaranya adalah ketidakpedulian (apatis) dan soal penahanan dokumen oleh agen atau majikan.

KJRI Hong Kong merespon hal ini dengan melakukan beberapa upaya, salah satunya adalah mengirimkan surat kepada majikan dan agen dalam tiga bahasa (Inggris, Hongkong, dan Indonesia). Tujuannya agar mereka mengizinkan pekerjanya untuk menyalurkan hak pilih mereka dengan datang ke TPS ataupun melalui Pos. Dalam surat yang diedarkan KJRI terdapat catatan khusus yang menyatakan agar surat tersebut langsung diberikan kepada helper yang bersangkutan, karena banyak kasus yang terjadi adalah ketika surat sampai di rumah majikan kerap tidak diberikan kepada pekerjanya.

KJRI Hong Kong kali ini juga menyelenggarakan pemungutan suara terdesentralisasi di 4 titik yakni; Wan Chai, Tsim Sha Tsui, Yuen Long Town Hall New Territories dan Tap Seac Multi-sports Pavillion Macau. Lokasi pemungutan suara kali ini berada di dalam ruangan (indoor) dengan koneksi internet yang cepat. Serta estimasi alokasi waktu tambahan agar mengakomodasi kekurangan penyelenggaraan Pemilu sebelumnya. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada calon pemilih. Tantangan yang kemudian dihadapi adalah mekanisme baru Pemilu serentak kali ini (pemilihan Capres-Cawapres dan Caleg) yang membuat Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) otomatis bekerja dua kali lipat baik dalam sosialisasi maupun pelaksanaan pemungutan suara.

Mengenai ketersediaan informasi, optimalisasi sosial media menjadi salah satu strategi PPLN maupun KJRI Hong Kong dalam mendiseminasi informasi dengan cepat mengenai Pemilu. Informasi terbaru mengenai Pemilu dapat diakses melalui fanpage Facebook PPLN Hong Kong and Macau atau Facebook KJRI Hong Kong. Mereka memiliki 140 ribu lebih pengikut di halaman Facebook-nya. Sedangkan untuk bertanya seputar Pemilu, dapat disampaikan kepada PPLN Hong Kong-Makau melalui pesan WhatsApp. Selain menunjang penyebaran informasi, media sosial juga menjadi sarana menampung aspirasi serta keluhan dari WNI di Hong Kong, tak terkecuali pekerja migran. Harus diakui bahwa Pemilu kali ini adalah Pemilu Sosmed sehingga memerangi hoaks juga menjadi salah satu konsen pemerintah.

C.2.2. Proses Pemungutan Suara di Hong Kong

C.2.2.1. Pemungutan Suara via TPSLN

PPLN Hong Kong dan Macau telah menetapkan 4 lokasi pemungutan suara untuk wilayah Hong Kong dan Macau sebagai berikut: (1) Queen Elizabeth Stadium, Wan Chai, Hong Kong Islands; (2) Tsim Sha Tsui Distric Kai Fong Association Hall, Tsim Sha Tsui (TST), Kowloon; (3) Yuen Long Town Hall, Yuen Long, New Territories; dan (4) Tap Seac Multi-sports Pavilion, Macau. Dengan 31 TPS yang tersebar di masing-masing lokasi pemungutan suara. Terdapat 16 TPS di Wan Chai, 6 TPS di Tsim Sha Tsui, 8 TPS di Yuen Long, dan 1 TPS di Macau.

Migrant CARE turut melakukan pemantauan di beberapa lokasi yakni Queens Elizabeth Stadium, Wan Chai dan District Kai Fong Association Hall, Tsim Sha Tsui (TST). Antusias Pekerja Migran Indonesia terlihat dari antrian yang mengular di lokasi

pemungutan suara. Peningkatan partisipasi ini sudah diprediksi sebelumnya oleh data pemuktahiran DPT yang dikumpulkan oleh PPLN setempat.

Dari hasil pantauan Migrant CARE di pemungutan suara pendahuluan di Hongkong, banyak pekerja migran Indonesia tidak bisa menjalankan hak pilihnya karena antrian yang sangat panjang sementara layanan lamban sehingga mereka harus pulang karena ada limitasi waktu yang diberikan majikan. Hambatan lain yang dihadapi adalah penahanan dokumen oleh agen atau majikan sehingga mereka tidak bisa memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen.

Di Wan Chai, antrian baru di bagi ke dalam dua barisan di dalam Gedung (tepat sebelum menuju front desk), antrian terbagi menjadi dua bagi yang memiliki undangan dan tidak (jumlahnya cukup banyak). Calon pemilih yang datang diminta menyerahkan surat undangan pemberitahuan pemungutan suara atau Formulir C6 kepada panitia untuk divalidasi data dirinya, menggunakan mesin scanner. Bagi yang memiliki undangan dapat langsung memasuki TPS yang tersebar di 3 lantai (lantai basement untuk TPS 1-6, lantai 1 untuk TPS 7-10, dan lantai 2 untuk TPS 11-16). Sampai pukul 14.30 waktu setempat, kondisi di masing-masing TPS terlihat sepi, sedangkan antrian menumpuk di luar. Salah seorang saksi yang bertugas dari pukul 09.00 sampai 14.00 mengatakan, menurut catatannya di TPS 9, hingga pukul 14.00 belum ada 200 pemilih yang masuk ke TPS. Pukul 15.30 antrian semakin panjang, banyak DPK yang mulai berdatangan. Pemilih di barisan rata-rata sudah menghabiskan waktu 4-5 jam mengantri.

Pukul 16.00 mulai terjadi beberapa ketegangan. Beberapa pemilih berteriak meminta masuk ke dalam Gedung. Kritik atas kelambatan pelayanan mulai lantang diserukan. Migrant CARE mendapat keterangan dari PPLN bahwa penyebab kelambatan proses adalah adanya alat scan yang tidak berfungsi. Selain itu petugas yang menangani C6 dan bukan terlihat tidak saling mendukung. Berkat koordinasi antara PPLN, Panwaslu dan Polisi Hong Kong, antrian mulai dapat dikendalikan sejak Pukul 17.30 waktu setempat.

Sedangkan di Tsim Sha Tsui, antrian tidak kalah panjangnya. Tetapi antrian sudah dipilah sejak dari luar bagi yang memiliki undangan dan tidak (masuk DPK). Bagi yang hanya membawa paspor dan Hong Kong ID sudah dapat langsung masuk ke TPS sejak pukul 14.00 waktu setempat. Proses pencoblosan di TPS berjalan cepat, bilik suara selalu penuh. DPK dapat langsung menuju TPS (tidak perlu melalui front desk) Nomor paspor dicatat oleh petugas TPS dan kita ttd. Adapun beberapa pemilih yang sakit dan tidak bisa jalan habis operasi, mendapat prioritas untuk dapat mengantri duduk di dalam dan dibopong ke TPS.

Meskipun jumlah TPS di Wan Chai lebih banyak, namun kurang tanggapnya pengaturan antrian maupun pelayanan front desk membuat proses penyelenggaraan menjadi tidak efektif dan efisiensi. Kita dapat lihat dari hasil rekapitulasi suara oleh saksi-saksi di TPS. TPS Wan Chai berhasil mengakomodir 10.630 suara, tidak jauh berbeda dengan TPS Tsim Tsa Tsui yang mengakomodir 10,056 suara.

C.2.2.2. *Pemungutan Suara via Surat Pos*

Meski proporsi pemungutan suara melalui Pos cukup besar, namun curahan sumber daya manusia dan pembiayaan Pemilu RI di Luar Negeri sebagian besar dicurahkan untuk penyelenggaraan pemungutan suara TPS LN dan itupun kinerjanya masih harus diperbaiki. Ini mengakibatkan adanya keterbatasan untuk mekanisme pengawasan dan pemantauan terhadap metode pemungutan suara melalui Pos.

Hal ini menjadi masalah karena tidak tersedianya instrumen pengawasan dan pemantauan proses pemungutan suara melalui Pos untuk memastikan bahwa mekanisme khusus untuk pemilih luar negeri ini tetap menjamin proses pemungutan suara yang bersandar pada prinsip LUBER (langsung, umum, bebas dan rahasia) serta JURDIL (jujur dan adil).

Meskipun sosialisasi dan pemuktahiran data sudah dilakukan sejak 6 bulan lalu, himbuan kepada PMI yang berpindah majikan dan berpindah alamat untuk segera melapor untuk memperbarui data sudah gencar dilakukan, tetap masih banyak surat yang kembali (retur). Bagi calon pemilih yang telah terdaftar melalui Pos namun surat suaranya kembali ini terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena minimnya informasi terkait kasus ini, adapun yang sudah mengadu mengaku respon penyelenggara lambat. Migrant CARE menverifikasi hal tersebut kepada panitia penyelenggara, bagi Pos bermasalah diarahkan untuk menghubungi hotline Whatsapp KJRI, yang kemudian akan mendapat balasan pemanggilan untuk menyoblos di KJRI sampai dengan tanggal 16 April 2019.

Banyak pekerja migran yang terdaftar melalui mekanisme pos mendatangi TPS pada hari pencoblosan guna menyalurkan hak suaranya karena mengaku tidak kunjung menerima surat suara melalui pos, namun mereka tidak dapat menyalurkan suaranya melalui TPS. Adapun temuan di TST, terdapat 3 pemilih yang terdaftar Pos datang ke TPS membawa surat suara mengaku tidak ada waktu untuk mengirim via pos. Panitia mengizinkan yang bersangkutan untuk mencoblos surat suaranya di salah satu TPS dan dimasukkan ke kotak tersendiri.

C.2.3. *Potensi Pelanggaran Pemilu di Hong Kong*

Dari pantauan langsung di lapangan, terdapat beberapa tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu yang dapat menjadi potensi pelanggaran. Berikut adalah faktor internal yang menjadi tantangan penyelenggaraan Pemilu 2019:

Tabel C.2.4. Potensi Pelanggaran Pemilu di Hong Kong

No	Bentuk Pelanggaran	Stakeholder Terkait
1	Antusias calon pemilih kurang diimbangi dengan respon penyelenggara, misal dalam mengantisipasi Daftar Pemilih Khusus (DPK)	PPLN, KPU
2	Tidak ada panitia yang memilah DPT dan DPK di antrian terluar, sehingga calon pemilih DPK yang sudah mengantri lama sejak pagi, harus keluar dan menunggu	PPLN, KPU

	kembali pada waktu yang ditentukan (satu jam sebelum TPS ditutup)	
3	Tata laksana TPS yang tertutup tidak memudahkan akses pemantauan	PPLN, KPU
4	Bilik suara dinilai kurang nyaman karena ukurannya yang kecil dan berdempetan, sehingga rentan menggerus asas kerahasiaan	PPLN, KPU, Panwaslu, Bawaslu
5	Perlu dipertimbangkan pula efisiensi alur pemilih yang menunggu di TPS dan mengantri di <i>front desk</i> , karena banyak bilik yang kosong, tetapi pemilih menumpuk di antrian front desk	PPLN, KPU, Panwaslu, Bawaslu
6	Ruang pengamatan saksi terbatas karena desain tata letak yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga proses pengawasan terbatas	PPLN, KPU, Panwaslu, Bawaslu
7	Adanya jarak waktu antara pemungutan suara yang berakhir pada tanggal 14 April 2019 dengan kegiatan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 juga membutuhkan jaminan keamanan dan kerahasiaan logistik, baik surat suara yang terpakai maupun yang tidak terpakai. Logistik hendaknya tersimpan aman, steril tanpa gangguan di wilayah akreditasi RI dengan pantauan CCTV 24 jam	PPLN, KPU, Panwaslu, Bawaslu

Adapun faktor eksternal yang menjadi tantangan, diantaranya:

1. Masih adanya dokumen yang ditahan oleh majikan dan agen sehingga calon pemilih tidak bisa menyalurkan hak pilihnya.
2. Di Hong Kong, keleluasaan Pekerja Migran menjadi pemilih terbatas dengan jam kerja/jam libur serta ijin dari majikan. Limitasi durasi waktu libur membuat calon pemilih DPK terancam gugur hak pilihnya karena waktu yang terbatas.
3. Beberapa calon pemilih menyatakan tidak mendaftar melalui mekanisme *online* sebelumnya, dikarenakan adanya ketakutan dokumen yang diunggah akan disalah gunakan.
4. Adanya kabar-kabar bohong (hoaks) yang beredar mengiringi penyelenggaraan pemungutan suara pendahuluan di luar negeri juga menjadi tantangan tersendiri. Khususnya melalui media sosial, yang mana menjadi salah satu kanal informasi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

C.2.4. Rekomendasi Penyelenggaraan Pemilu di Hong Kong

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemungutan suara pendahuluan di Luar Negeri mutlak dilakukan mulai dari keseriusan untuk meningkatkan kepesertaan warga negara Indonesia di luar negeri. Penyederhanaan metode pemungutan suara yang mengakomodasi keberjarakan memanfaatkan teknologi informasi dengan tetap menjamin asas *luber dan jurdil* serta tata cara pengawasan dan pemantauan yang tentunya tidak sama dengan kondisi di dalam negeri. Ini membutuhkan perubahan persepsi secara mendasar di kalangan penyelenggara Pemilu yang selama

ini menganggap bahwa pemungutan suara pendahuluan untuk warga negara Indonesia di luar negeri hanya pemilu pelengkap.

Penyelenggaraan pemungutan suara pendahuluan di Hong Kong bisa dibilang adalah Pemilu terbesar yang pernah diselenggarakan di Hong Kong. Hal ini menjadi sarana pendidikan politik bagi seluruh masyarakat Hong Kong bukan hanya Warga Negara Indonesia saja. Untuk itu sudah seharusnya Pemilu Indonesia menampilkan wajah demokrasi Indonesia yang damai, transparan dan berintegritas di mata dunia.

C.3. Hasil Pemantauan di Singapura

C.3.1. Proses Pemungutan Suara di Singapura

Metode Pemungutan

Pada Pemilu 2019, pemungutan suara di Singapura menerapkan dua metode, yaitu melalui; Surat Pos dan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPS-LN). Dari Daftar Pemilih Tetap yang sudah ditetapkan, jumlah pemilih Surat Pos di Singapura berjumlah 18.480 orang, sedangkan jumlah pemilih yang akan memilih menggunakan hak pilih melalui TPS-LN berjumlah 106.923 orang. Terdapat 273 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), 2.133 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan 5 orang yang mendapatkan formulir A5 (pindah memilih). Sehingga total keseluruhan Daftar Pemilih di Singapura berjumlah 127.754 orang.

Pemungutan suara melalui TPS-LN dilakukan pada hari Minggu, 14 April 2019, berlokasi di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Sementara metode pos sudah dimulai sejak tanggal 2 Maret hingga 17 April 2019. Panitia penyelenggara juga memfasilitasi pemilih surat pos yang sampai 17 April belum mengirimkan kembali surat suaranya, melalui pencoblosan langsung melalui TPS.

Secara teknis, penyelenggaraan pemungutan suara langsung melalui TPS di Singapura menggunakan sistem *barcode* untuk mengorganisir pemilih. Sistem ini memudahkan pengorganisasian pemilih menjadi lebih efisien dan waktu yang efektif, serta meminimalisir adanya duplikasi hak pilih. PPLN Singapura menyediakan 50 TPS yang terbagi ke dalam 6 Cluster. Mekanisme pembagian ini terpantau efektif untuk memecah arus mobilisasi pemilih dalam pemungutan suara. Tenaga penyelenggara Pemilu (KPPSLN) di Singapura berjumlah 265 orang. Proses pemungutan suara dimulai pukul 08.15 waktu Singapura, dan berakhir pada pukul 19.11 waktu Singapura.

Berdasar pendokumentasian PPLN Singapura, berikut adalah komposisi pemilih dalam proses pemungutan suara tanggal 14 April 2019;

Tabel C.3.1.1 Kategori Pemilih di Singapura

No	Kategori Pemilih di Singapura	Jumlah
1	Pemilih TPS Langsung	36.692 orang
2	Pemilih Pos yang menggunakan TPS	1.414 orang
3	Pemilih Pos	10.296 orang
	Total Jumlah Pemilih di Singapura	48.402 orang

PPLN juga menyediakan fasilitas penjemputan pemilih di beberapa titik transportasi umum. Hal ini dilakukan, mempertimbangkan akses menuju KBRI yang jauh dari transportasi publik. Namun berdasarkan penuturan beberapa pekerja migran yang menjadi pemilih, fasilitas penjemputan ini masih terbatas.

Penyelenggaraan yang Inklusif dan Cukup Imparsial

Secara umum, penyelenggaraan Pemilu di Singapura berjalan cukup inklusif. Panitia penyelenggara menyediakan gate/jalur khusus bagi pemilih berkebutuhan khusus (manula, disabilitas, ibu hamil dan yang membawa anak). Tersedianya gate ini memudahkan para pemilih berkebutuhan khusus untuk menggunakan hak pilihnya.

Inklusifitas penyelenggaraan juga terukur dari prosedur persyaratan pemilih pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini terpantau saat ada pemilih yang hanya memiliki kartu pengobatan sebagai penunjuk identitas, namun tetap diperbolehkan untuk masuk dan menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan informasi dari KPPS, hal ini dapat dilakukan karena secara sistem, pengawasan untuk menghindari duplikasi pemilih sudah dilakukan menggunakan sistem barcode dan kamera CCTV.

Dalam mekanisme pengawasan, Panwaslu terpantau cukup baik dan imparsial dalam mengorganisir saksi dari Pasangan Calon Presiden 01 dan 02. Kedua pihak saksi difasilitasi untuk mendapatkan ruang yang cukup untuk menjalankan fungsinya sebagai saksi, juga cukup tegas untuk membatasi aktivitas saksi yang terlihat melampaui wewenangnya tanpa memihak secara subyektif.

Secara umum fasilitas pendukung untuk penyelenggaraan pemungutan suara di KBRI Singapura terpantau cukup meliputi akses toilet dan juga mobil dan tenaga medis yang disiagakan.

Jumlah Pemilih yang Membludak

Proses pemungutan suara diwarnai dengan antrian pemilih yang sangat panjang. Berdasarkan pemantauan, sejak pukul 09.00 waktu Singapura antrean pemilih sudah mengitari kompleks KBRI Singapura, dengan panjang antrian mencapai lebih kurang 5 kilometer dan waktu tunggu sekitar 2 jam untuk sampai ke TPS.

Menurut informasi dari petugas KPPS, membludaknya antrian pemilih disebabkan oleh euforia pemilih yang tinggi. PPLN menuturkan sudah membagi waktu pemilihan untuk memecah jumlah pemilih yang terdaftar berdasarkan kloter pagi, siang dan sore. Namun jumlah pemilih pada saat pemungutan melonjak tidak hanya pemilih yang terdaftar, tetapi juga pemilih yang belum terdaftar namun memenuhi persyaratan untuk memilih (membawa paspor/petunjuk identitas lainnya). Langkah responsif yang diambil PPLN Singapura adalah dengan membuka jalur Daftar Pemilih Khusus yang sedianya dibuka setelah pukul 17.00 waktu setempat, menjadi dibuka sejak sekitar pukul 10.00 waktu setempat karena jumlah pemilih yang masuk kategori DPK cukup besar.

Pada sisi yang lain, euforia tinggi yang berdampak pada panjangnya antrian juga berpotensi menyebabkan beberapa pemilih enggan untuk menggunakan hak pilihnya karena harus mengantri panjang. Ini penting menjadi catatan karena pengelolaan antrian pemilih yang tidak dilengkapi dengan langkah-langkah mitigasi dan responsif dapat memicu hilangnya hak pilih seseorang karena tidak merasa terfasilitasi dengan baik. Antrian pemilih yang panjang ini di awal tidak disikapi dengan penyediaan air minum. Meskipun tidak diatur secara prosedural, hal ini berpengaruh besar pada stabilitas kondisi pemilih yang telah mengantre dalam waktu yang cukup lama. Penyediaan air minum untuk pemilih terpantau terfasilitasi pada sore hari itupun juga masih bersifat terbatas.

Jumlah pemilih yang membludak pada kenyataannya tidak sebanding dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap secara keseluruhan. Artinya, meskipun cukup tinggi, partisipasi pemilih di Singapura belum sepenuhnya terakomodir. Jumlah partisipasi total pemilih di Singapura terhitung sebesar 39 persen.

Tabel C.3.1.2. Partisipasi Pemilih di Singapura

No	Jenis Pemilih	Jumlah dalam DPT	Jumlah Suara yang Masuk	Selisih	% partisipasi
1	TPS	106,923	36,692	70,231	34%
2	Surat Pos	18,480	11,710	6,770	63%
	Jumlah Total	125,403	48,402	77,001	39%

C.3.2. Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu di Singapura

Pengelolaan keamanan pada penyelenggaraan Pemilu di Singapura terpantau cukup baik. Secara teknis, pengamanan yang dilakukan oleh tim pengamanan KBRI Singapura selama proses pemungutan suara, masa jeda hingga proses penghitungan sudah cukup baik. Adanya koordinasi dengan keamanan dan otoritas pengamanan Singapura juga terlihat pada proses pemungutan suara saat personel pengamanan Singapura turut mendukung dan mengatur kelancaran proses di luar KBRI.

Pengamanan Kotak Suara

Penyimpanan kotak suara setelah proses pemungutan suara dilakukan di gudang penyimpanan yang berada di *basement* KBRI. Berdasarkan pemantauan dan informasi yang didapatkan dari PPLN juga Panwaslu, pengamanan dilakukan dengan mengunci gudang penyimpanan, dengan 3 buah gembok yang menjadi otoritas Panwaslu, PPLN dan pihak keamanan. Pengamanan tambahan dilakukan dengan menempatkan 4 titik CCTV di sekitar lokasi penyimpanan dan dua orang personil pengamanan dari Mabes Polri yang ditempatkan di depan gudang penyimpanan.

Pada masa jeda setelah penghitungan TPS dilakukan hingga waktu penghitungan, wilayah KBRI terpantau memiliki keamanan yang cukup ketat, meskipun telah membuka layanan publik seperti biasa. Akses masuk menuju KBRI sangat terbatas hanya untuk orang yang memiliki urusan dengan layanan publik reguler KBRI.

Proses pengamanan pada tahapan pemungutan suara melalui TPS hingga penghitungannya memang cukup jelas dan ketat. Namun tahapan yang masih belum jelas pengamanannya adalah pada metode pemungutan suara melalui surat pos. Belum ada mekanisme pengawasan dan pengamanan yang cukup ketat untuk merespons pengelolaan surat pos yang telah dikirimkan kembali ke KBRI.

C.3.3. Proses Penghitungan Suara di Singapura

Penghitungan suara dilakukan pada Rabu, 17 April 2019. Proses penghitungan diawali dengan *briefing* saksi yang dilakukan Panwaslu Singapura yang dilanjutkan dengan pembukaan gudang penyimpanan suara yang juga disaksikan oleh saksi pasangan Calon Presiden 01 dan 02. Terdapat sekitar 150 orang saksi yang tersebar di masing-masing titik penghitungan. Proses penghitungan suara juga dilengkapi dengan siaran langsung yang disediakan oleh KBRI Singapura, namun siaran langsung ini tidak begitu strategis karena penontonnya tidak bisa melihat proses secara komprehensif.

Pada proses penghitungan ini, panitia penyelenggara membuat pembagian penghitungan suara menjadi 5 cluster yang terdiri dari; 50 titik penghitungan suara TPS dan 9 titik penghitungan surat pos. Penghitungan suara dimulai pukul 14.05 waktu Singapura. Terdapat perbedaan waktu penyelesaian penghitungan suara TPS dan Surat Pos. Penghitungan suara TPS selesai pukul 00.34 waktu Singapura. Sementara penghitungan suara surat pos selesai sekitar pukul 03.00 dini hari waktu Singapura.

Merespons situasi yang tidak lagi kondusif, rekapitulasi penghitungan suara tidak diselesaikan pada saat yang sama dan dilanjutkan pada malam hari hingga keesokan harinya. Pengelolaan tenaga KPPS dan PPLN juga perlu menjadi pertimbangan agar cukup dan menghindari terforsirnya tenaga penyelenggara untuk melakukan penghitungan suara.

C.3.4. Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu di Singapura

Kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2019 di Singapura dapat terukur dalam pemantauan daring dan juga luring di antaranya terkait;

Ketercukupan Informasi

Terdapat website PPLN Singapura yang menyediakan informasi terkait penyelenggaraan Pemilu 2019 di Singapura. Secara daring, portal ini juga menyediakan laman untuk mendaftarkan sebagai pemilih tambahan. Selain melalui website, aktivitas penyediaan informasi secara daring juga dilakukan menggunakan media sosial KBRI, hingga layanan hotline Whatsapp PPLN Singapura.

Dalam konteks luring atau offline, penyediaan informasi dilakukan baik oleh PPLN maupun KBRI Singapura. PPLN Singapura telah menyebarkan surat undangan pemilihan kepada WNI di Singapura yang telah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2019. Selain melalui mekanisme surat menyurat, imbauan juga ditampilkan dalam poster dan spanduk yang dipasang di sekitar lingkungan KBRI Singapura.

Upaya penyediaan informasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di Singapura dapat dikatakan belum mampu mendorong partisipasi politik WNI secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketimpangan antara jumlah suara yang masuk dengan jumlah total Daftar Pemilih Tetap berkisar 61 persen. Ketidacukupan informasi perihal tata cara dan prasyarat terkait penggunaan hak pilih yang sah juga diduga menjadi satu penyebab surat suara yang tidak sah di Singapura.

Tabel C.3.4.1. Suara Sah dan Tidak Sah di Singapura

No	Kategori	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	%
1	Pilpres	47,911	491	1.02%
2	Pileg	45,530	2,389	5.25%

C.3.5. Potensi Pelanggaran Pemilu di Singapura

Adapun beberapa potensi dan indikasi pelanggaran yang ditemukan pada penyelenggaraan Pemilu di Singapura, meliputi:

Tabel C.3.5.1. Potensi Pelanggaran Pemilu di Singapura

No	Potensi Pelanggaran	Keterangan/Penjelas	Stakeholder Terkait
1	Jumlah pemilih yang terlampaui besar	Upaya-upaya untuk merespons jumlah pemilih yang membludak memang telah dilakukan, namun masih berpotensi membuat penyelenggaraan pemilu menjadi tidak kondusif, yang juga berdampak pada keengganan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini perlu menjadi perhatian, agar penyelenggaraan pemilu ke depan lebih baik untuk bisa mengakomodir pemilih.	KPU, PPLN
2	Dugaan Intervensi KPPS dalam Pemungutan Suara	Hal ini ditunjukkan dari keberadaan petugas KPPS yang berada di dekat bilik suara dan terlihat beberapa kali berinteraksi dengan pemilih. Situasi ini berpotensi bertentangan dengan etik pemungutan suara melalui bilik suara yang seharusnya berprinsip rahasia, kecuali bagi yang berkebutuhan khusus.	KPU, PPLN
3	Peranan saksi dalam proses pemungutan suara di TPS LN	Mobilitas saksi pasangan calon Presiden O2 terpantau beberapa kali melampaui batasan yang telah	Bawaslu, Panwaslu

		<p>ditetapkan, dengan berada sangat dekat dengan bilik suara.</p> <p>Hal ini berpotensi untuk mengganggu jalannya pemungutan suara, selain potensi intervensi kepada pemilih dan panitia penyelenggara.</p>	
4	Aktivitas Kampanye di Antrian Pemilih	<p>Terdapat aktivitas tim pendukung Caleg DPR RI, Ady Muzady dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di antrian pemilih.</p> <p>Tim pendukung beberapa kali mengajak pemilih untuk <i>beryel-yel</i> dan menyuarakan dukungan untuk salah satu kandidat Calon Presiden.</p>	Bawaslu, Keamanan
5	Tenaga penyelenggara Pemilu yang tidak mencukupi pada proses penghitungan dan rekapitulasi suara	<p>Tata kelola tenaga penyelenggara pemilu (KPPS LN) Singapura tidak mampu menyelesaikan penghitungan suara dalam waktu yang cukup singkat.</p> <p>Tenaga panitia Pemilu yang terforsir ini berpotensi pada situasi-situasi pelanggaran pada aspek yang lebih luas.</p>	KPU
6	Partisipasi Pemilih yang masih cenderung rendah	<p>Meninjau jumlah suara yang masuk melalui metode surat pos dan TPS, partisipasi pemilih secara keseluruhan masih cenderung kecil (39%).</p> <p>Menghitung perbandingan antara jumlah DPT dan jumlah suara yang masuk, partisipasi pemilih melalui Surat Pos lebih tinggi (69%) dibandingkan partisipasi pemilih melalui TPS (34%)</p>	KPU

C.3.6.Rekomendasi Penyelenggaran Pemilu di Singapura

1. Merumuskan upaya-upaya mitigasi untuk kemungkinan melonjaknya jumlah pemilih secara teknis maupun non-teknis demi menjamin stabilitas penyelenggaraan Pemilu dan terakomodirnya seluruh hak pemilih, khususnya pada tahapan pemungutan suara langsung melalui TPS.
2. Mengoptimalkan penyediaan fasilitas penjemputan pemilih di titik-titik kumpul calon pemilih (stasiun bus dan MRT) dengan jangkauan yang lebih luas untuk mencakup calon pemilih.
3. Memformulasi mekanisme pengawasan yang konkrit untuk metode pemungutan suara melalui Surat Pos yang rentan dimanipulasi.

4. Melakukan upaya-upaya evaluatif perihal penyelenggaraan Pemilu dan partisipasi pemilih dalam Pemilu untuk menyikapi partisipasi pemilih yang cenderung masih rendah.
5. Reformulasi mekanisme kerja untuk efektifitas tenaga pada penyelenggaraan Pemilu Serentak sebagai respons terfornsirnya tenaga penyelenggara Pemilu pada tahapan pemungutan hingga penghitungan suara, yang berpotensi menciderai prinsip-prinsip jaminan kesehatan dan sosial seseorang.
6. Memastikan ketercukupan informasi untuk pemilih dalam Pemilu Indonesia di luar negeri, merespons masih rendahnya angka partisipasi pemilih dan adanya potensi surat suara tidak sah yang cukup signifikan

D. PENUTUP DAN KESIMPULAN

Berulang kali warga negara Indonesia dikecewakan oleh penyelenggara pemilu Indonesia di luar negeri dengan berbagai kerumitan aturan yang menjadi penghambat (*bottlenecking*) tatkala mereka sudah siap sedia menjadi pemilih dalam pemilu pendahuluan. *Seharusnya penyelenggara pemilu Indonesia di luar negeri memiliki sensitifitas terhadap karakter-karakter pemilih Indonesia di luar negeri yang berbeda dengan pemilih dalam negeri.* Laporan pemantauan Pemilu 2019 di luar negeri mencakupi wilayah Malaysia, Hong Kong dan Singapura ini dibuat untuk dijadikan basis rekomendasi perbaikan tata kelola penyelenggaraan Pemilu Luar Negeri ke depan yang lebih baik.

Berdasarkan pemantauan penyelenggaraan Pemilu di Malaysia, Hong Kong dan Singapura, dapat dirumuskan rekomendasi untuk penyelenggaraan Pemilu ke depan secara umum, di antaranya:

1. Penegakan hukum yang tegas terhadap segala potensi pelanggaran Pemilu di luar negeri.
2. Perlu dilakukannya langkah-langkah evaluatif atas penyelenggaraan Pemilu 2019 di luar negeri dalam aspek teknis dan substansi.
3. Pembaruan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri secara lebih komprehensif untuk mencakup seluruh Warga Negara Indonesia.
4. Menyusun langkah strategis untuk merespons partisipasi politik di luar negeri yang masih cenderung rendah.
5. Menyederhanakan metode pemungutan suara di luar negeri.
6. Mempertimbangkan adanya Daerah Pemilihan Khusus Luar Negeri sebagai salah satu skema strategis untuk menyederhanakan mekanisme Pemilu di luar negeri.

E. LAMPIRAN

F.1. Dokumentasi Pemantauan Pemilu di Malaysia



Foto 1.1 Kotak Surat Suara di Johor Bahru dari container box yang hanya dilindungi oleh besi kecil sebagai kunci



Foto 1.2. Saksi masih menggunakan atribut partai di Wisma Duta, Kuala Lumpur



Foto 1.3. Petugas terpaksa berteriak-teriak memanggil nama calon pemilih. Tidak adanya alat penguat suara akhirnya para calon pemilih saling berjubel di Wisma Duta, Kuala Lumpur

F.2. Dokumentasi Pemantauan Pemilu di Hong Kong



Foto 2.1. Antrian panjang di lokasi pemungutan suara TST disebabkan oleh pemilih dari Wan Chai yang beralih ke lokasi ini

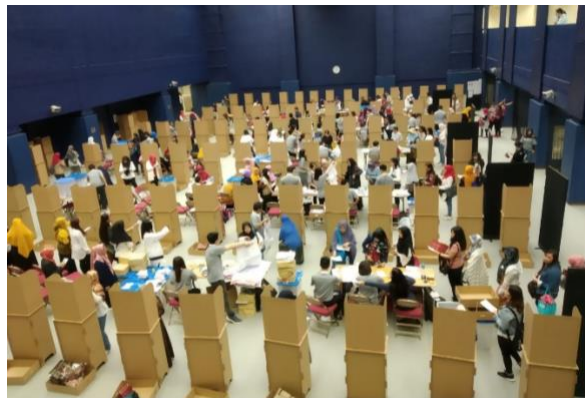


Foto 2.2. Layout TPS 1-6 di Wan Chai, bilik yang kurang nyaman dengan jarak antar TPS yang terlalu dekat

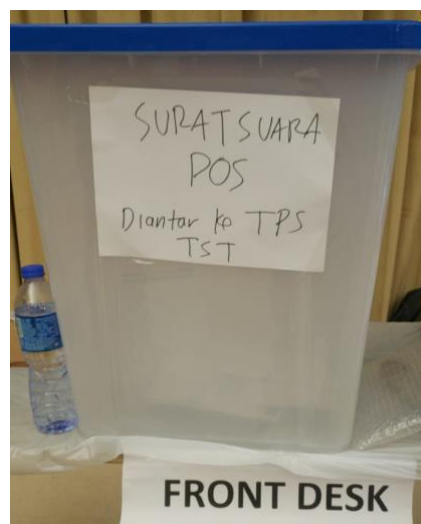


Foto. 2.3. Kotak suara bagi pemilih terdaftar pos yang mengantarkan langsung ke TPS surat suaranya.

F.3. Dokumentasi Pemantauan Pemilu di Singapura



Foto 3.1. Jalur Pemilih menuju TPS di KBRI Singapura



Foto 3.2. Aktivitas Tim Pendukung di Barisan Antrian



Foto 3.3. Dugaan Intervensi KPPSLN di Bilik Suara